

Re-Evaluating ‘Essential Security Interests’ Clauses under Investment Treaties in Light of The World Trade Organization (WTO) ‘Russia – Traffic’ Judgement: A Case Study of India’s Bilateral Investment Treaties

Ariel River Of Joy,¹ M. Hawin²

ABSTRACT

This legal research aims to analyze (1) the different interpretations of essential security interests clauses especially under Indian BITs; (2) the possible implications which the WTO *Russia -Traffic in Transit* judgement may bring to the contemporary interpretations of the essential security interests clause; and (3) the possible benefits of understanding the aforementioned interpretations towards Indonesia.

This legal research is conducted through a normative approach or doctrinal research. Accordingly, the data used in this study is secondary data, which include various legal resources such as treaties, case laws, and scholarly writings. In this regard, the data collected was analyzed in a descriptive manner under a qualitative method.

This research finds that, there are numerous interpretations of essential security interests clauses which may depend on the existence of certain elements in the clause and the terms used in it. Secondly, the WTO *Russia – Traffic in Transit* judgement clarifies at least two things in the interpretations of such clauses, that the self-judging nature which may exist in several of these clauses which were previously thought to be absolute have certain limitations subject to the wording of the clause in question, and that the interpretation of such clauses must be conducted in good faith by not veiling other interests as 'essential security interests'. Finally, Indonesia may also use the aforementioned interpretation in case of drafting new treaties and future disputes especially when the formulation of the treaties are similar or when the international investment agreement in question is inspired by Article XXI GATT.

Keywords: essential security interest, bilateral investment treaty, exception clause, World Trade Organization.

¹ Student at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S-1 Regular, 2018).

² Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

***Mengkaji Ulang Klausula ‘Kepentingan Keamanan Esensial’ dibawah
Perjanjian Investasi berdasarkan Putusan ‘Russia – Traffic’ Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO): Studi Kasus Perjanjian Investasi Bilateral India***

Ariel River Of Joy,¹ M. Hawin²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis (1) perbedaan interpretasi klausula kepentingan keamanan esensial di bawah Perjanjian Investasi Bilateral India; (2) kemungkinan implikasi yang dapat diberikan oleh putusan WTO Russia – Traffic in Transit terhadap interpretasi kontemporer dari klausula kepentingan keamanan esensial; dan (3) kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari memahami interpretasi-interpretasi di atas terhadap Indonesia.

Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan normatif atau penelitian doktrinal. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi berbagai sumber hukum seperti perjanjian internasional, putusan, dan karya akademik. Dalam hal ini, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif.

Penelitian hukum ini menemukan bahwa, terdapat berbagai interpretasi klausula kepentingan keamanan esensial yang bergantung pada keberadaan unsur-unsur tertentu dalam klausula dan nomenklatur yang digunakan di dalamnya. Kedua, putusan WTO Russia – Traffic in Transit menerangkan setidaknya dua hal dalam interpretasi klausula tersebut, yakni sifat penilaian sendiri yang terdapat pada beberapa klausula ini yang sebelumnya dianggap sebagai mutlak memiliki batasan-batasan tertentu yang bergantung pada penggunaan kata pada klausula tersebut, dan interpretasi akan klausula-klausula tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dengan tidak menutupi kepentingan lain sebagai ‘kepentingan keamanan esensial’. Terakhir, Indonesia juga dapat menggunakan interpretasi tersebut dalam hal penyusunan perjanjian baru dan perselisihan di masa depan terutama ketika rumusan perjanjian serupa atau ketika perjanjian investasi internasional yang bersangkutan diilhami oleh Pasal XXI GATT.

Kata kunci: *kepentingan keamanan nasional, perjanjian investasi bilateral, klausula pengecualian, Organisasi Perdagangan Dunia.*

¹ Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (S-1 Reguler, 2018).

² Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.